

---

## Peran *Civil Society* dalam Resolusi Konflik: Studi Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Perdamaian di Tengah Perang Israel-Palestina

*The Role of Civil Society in Conflict Resolution: A Study of the Role of Muhammadiyah in Creating Peace in the Midst of the Israel-Palestine War*

**Imam Mahdi**

Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: [mahdi@umy.ac.id](mailto:mahdi@umy.ac.id)

---

### Article Info

**Received:**

13/10/2024;

**Received in revised form:**

20/10/2024;

**Accepted:**

21/10/2024;

**Available online:**

21/10/2024;

2549-9505/© 2024 The Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

**DOI:**

[10.30595/jssh.v8i2.24193](https://doi.org/10.30595/jssh.v8i2.24193)

---

### Abstract

Muhammadiyah sebagai salah satu *civil society* dibutuhkan perannya dalam perang Israel-Palestina. Perang tersebut telah mengakibatkan masyarakat sipil terbunuh dan mengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Muhammadiyah dalam mewujudkan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer tentang kebijakan Muhammadiyah dan data sekunder dari jurnal dan media. Penelitian ini menemukan bahwa peran resolusi konflik dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya internasionalisasi. Selain itu juga, Muhammadiyah mendukung pendirian negara Palestina sebagai upaya meminimalisir kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Muhammadiyah juga aktif dalam memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan pendekatan Barnes (2006) juga terlihat bahwa Muhammadiyah sudah berupaya maksimal untuk menjalankan delapan misi yang dapat dilakukan oleh *civil society* dalam mewujudkan perdamaian.

**Kata Kunci:** *Civil Society, Muhammadiyah, Resolusi Konflik*

*Muhammadiyah is a civil society organisation that contributes to the Israeli-Palestinian conflict. There have been civilian casualties and displacement as a result of the fighting. The purpose of this study is to evaluate Muhammadiyah's initiatives to bring about an end to the Israeli-Palestinian conflict. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach, using primary data on Muhammadiyah policies and secondary data from journals and media. According to this study, Muhammadiyah uses conflict resolution as a component of its internationalisation efforts. Furthermore, Muhammadiyah is in favour of the creation of a Palestinian state to reduce Israeli violence. Muhammadiyah is also engaged in direct and indirect aid provision. Using the Barnes approach (2006), it is also evident that*

---

*Muhammadiyah has made every attempt to fulfil the eight missions that civil society can fulfil in order to bring about peace.*

**Keywords:** *Civil Society, Muhammadiyah, Conflict Resolution*



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

---

## 1. Pendahuluan

Peran civil society dalam perang Israel-Palestina sangat dibutuhkan. Kedua belah pihak seharusnya sudah menghentikan segala upaya agitasi dan agresi militer. Hal ini terjadi karena dampak dari perang tersebut mayoritas adalah masyarakat sipil. Berdasarkan catatan dari Council on Foreign Relations sejak Oktober 2023 sampai dengan Juli 2024 sebanyak 35,000 orang dari Palestina sudah terbunuh, mayoritas merupakan masyarakat sipil. Sedangkan dari pihak Israel hanya sebanyak 100 orang disandera oleh Hamas (CRF, 2024).

Civil society yang dapat dijadikan sebagai model dalam upaya pembangunan perdamaian adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah dianggap mampu menjadi lokomotif dalam pembangunan perdamaian baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional (Latief, 2017; Mahdi & Chusnul, 2022; Syaifullah, 2019). Kemampuan ini terletak pada nama baik Lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah yang selama ini bergerak dalam berbagai bidang kehidupan (Rachmawati Husein, 2015).

Walaupun demikian, kritik terhadap peran Muhammadiyah juga terjadi. Hal ini terjadi karena Muhammadiyah bukan civil society yang fokus terhadap upaya perdamaian (Adi Nugroho, 2023). Muhammadiyah lebih dianggap sebagai civil society yang fokus pada pendidikan, filantropi dan kesehatan (Efendi et al., 2021). Upaya perdamaian yang dijalankan selama ini lebih banyak bicara dalam tataran normatif bukan pada aksi (Burhani, 2018).

Secara umum para pemikir relasi antara civil society dengan resolusi konflik terbagi menjadi dua kategori utama. Di satu sisi para ilmuwan merasa bahwa peran civil society sangat signifikan terhadap resolusi konflik. Ini diutarakan oleh Funnell (2019) yang menjelaskan bahwa civil society dapat menjadi penggerak dalam proses peace building. Esra Cuhadar (2010) berdasarkan pada temuannya menjelaskan bahwa civil society berperan penting dalam memperkuat perdamaian. Temuan ini berdasarkan pada 50 data perjanjian perdamaian yang melibatkan civil society. Setrana (2022) menjelaskan bahwa civil society memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami sebuah konflik. Hal ini berdasar pada kasus Agogo di Ghana.

Sedangkan yang lainnya menganggap bahwa civil society tidak memiliki peranan penting dalam penyelesaian konflik. Hal ini diutarakan oleh Nilsson (2021) yang menyebutkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh civil society dalam konflik tidak cukup untuk meyakinkan akan terwujudnya perdamaian. Hal serupa juga dijelaskan oleh Elfversson & Nilsson (2022) yang menyebutkan bahwa civil society akan terpinggirkan dalam negosiasi jika negara dijadikan sebagai mediator utama. Ahmed (2020) menjelaskan bahwa civil society kurang memiliki kerjasama dengan stakeholder lainnya. Ini dicontohkan dalam kasus penanganan konflik yang terjadi di Somalia. Kyselova (2023) menjelaskan bahwa civil society tidak akan dapat memberikan peran penting dalam resolusi konflik jika civil society tersebut masih berada di bawah kendali negara.

Jika diperhatikan dari dua pendekatan tersebut seolah menandakan bahwa ada optimisme di satu sisi sedangkan pesimisme di sisi yang lain. Argumentasi dari kedua pandangan ini cukup jelas, mereka mengutarakan pendapatnya dengan melihat fakta di lapangan. Dalam kasus konflik Irlandia Utara, civil society dianggap berhasil dalam mendorong kedua belah pihak yang berkonflik untuk segera menyelesaikan konflik (Kmec & Ganiel, 2019). Keberhasilan ini juga dapat dilihat dari perjanjian Tripartite Accord dalam kasus Afrika Selatan (Mcnamee, 2021). Sedangkan pada kasus yang gagal ini

---

juga terlihat dari kehadiran civil society dalam Rohingnya (Kuwado, 2017), atau dalam kegagalan pencapaian perundingan damai MILF-Pemerintah Filipina pada tahun 2008 (Hicken, 2009).

Dalam kasus Israel-Palestina, keberadaan civil society sebenarnya sangat penting. Ini terjadi karena konflik ini sudah terjadi pasca Perang Dunia Kedua, namun sampai tahun 2024 belum dapat diselesaikan. Arti penting civil society ini diutarakan oleh Al-Nashif (2024) yang menjelaskan bahwa civil society internasional berperan penting dalam mewujudkan hak dasar masyarakat Palestina. Hal serupa juga disampaikan oleh Huberman (2021) yang menginginkan agar civil society menjadi pelopor dalam mendorong munculnya perdamaian. Hal ini dilandaskan pada fakta bahwa pernah terwujud Camp David Accord pada tahun 1978. Munayyer (2014) juga mendorong agar civil society lebih dilibatkan dalam mewujudkan perdamaian. Selama ini, konflik seringkali lebih bersifat state-centric dibanding dengan keterlibatan civil society. Chaney (2023) menyebutkan civil society berperan penting dalam mendorong diberikannya hak dasar bagi anak-anak. Sebab di tengah perang, hak dasar anak-anak seringkali diabaikan sehingga memberikan dampak buruk terhadap perkembangan hidup mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Sugara (2020) yang menyebutkan bahwa civil society berperan secara langsung terhadap public policy, advocacy, international advocacy dan empowerment.

Sedangkan kajian peran peran civil society khususnya Muhammadiyah dalam konflik Israel-Palestina juga sudah dibahas oleh Kasmuri Selamat (2023) yang menyebutkan keterlibatan Muhammadiyah dan NU dalam membangun perdamaian di Timur Tengah. Jatmika & Anggraheni (2021) tentang keterlibatan organisasi Islam Indonesia menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Begitu juga dengan Suprpto dkk (2019) yang menjabarkan tentang peran Muhammadiyah dan NU dalam nilai-nilai kemanusiaan sesama Covid-19. Hal ini juga dijabarkan oleh Sugara (2020) yang menjelaskan tentang respon umat Islam Indonesia dalam melihat konflik yang terjadi di Suriah, Yaman dan Myanmar. Begitu juga dengan Husein dkk (2024) yang menjelaskan tentang peran Muhammadiyah dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan di berbagai negara.

Barnes (2006) menjelaskan bahwa civil society dapat menjalankan beberapa peran dalam menangani konflik. Pertama, civil society dapat melakukan kampanye penyelesaian konflik secara konstruktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menilik lebih kuat tentang akar utama dari penyebab terjadinya konflik. Kedua, mengubah pandangan terhadap konflik. Konflik yang terlihat sangat kekuasaan perspektif dapat diubah ke dalam hal yang lebih sederhana seperti budaya. Ketiga, memberikan gambaran masa depan yang lebih baik. Ini dapat dijalankan dengan membangun visi ke depan, membuat agenda perdamaian, serta membangun kebijakan perdamaian. Keempat, melakukan mobilisasi terhadap konstitusi untuk perdamaian. Ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk menekan pemerintah dalam mewujudkan perdamaian. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membangun solidaritas internasional dalam memberikan tekanan secara global. Kelima, menggunakan kekuasaan untuk mengurangi kekerasan dan mempromosikan stabilitas. Kekuasaan yang digunakan untuk memberikan peringatan dini serta respon cepat terhadap krisis kemanusiaan. Meredakan ketegangan dan mulai menciptakan pendampingan terhadap masyarakat. Keenam, menciptakan perdamaian dengan membantu terwujudnya perjanjian. Ini dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi dan dialog informal dengan pihak yang berkonflik. Termasuk juga dengan memfasilitasi adanya negosiasi di belakang layer. Ketujuh, melakukan perdamaian pragmatis, serta melakukan perdamaian di level komunitas. Kedelapan, melakukan transformasi tentang penyebab dan akibat konflik serta menciptakan hubungan damai. Menangani penyebab dan akibat secara struktural, melakukan penyembuhan jiwa. Kesembilan, melakukan perubahan nilai dan budaya, ini dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan perdamaian.

Tulisan ini akan menjabarkan tentang upaya Muhammadiyah dalam mewujudkan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina dinamika perjalanan Muhammadiyah untuk menjadikan agenda resolusi konflik sebagai bagian dari peran internasionalisasi Muhammadiyah. Selain itu juga akan membahas tentang posisi Muhammadiyah dalam melihat Perang Israel dan Palestina. Kemudian menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah serta melihat peran yang dilakukan

oleh Muhammadiyah dengan menggunakan analisis Barnes (2006) dalam melihat peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk menjelaskan tentang peran yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam agenda perdamaian. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berdasarkan pada dokumen asli yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan media. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dalam konteks ini dengan sembilan peran *civil society* sebagaimana yang dijelaskan Barnes (2006).

Dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai objek utama penelitian. Fokus penelitian ini dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2024. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Dengan dilengkapi analisis mendalam dengan peran yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Menurut Robert E (2000) studi kasus bukanlah pilihan metodologis, melainkan alat untuk mendefinisikan secara sempit apa yang akan diteliti. Data dikumpulkan melalui analisis data dari buku teks dan berbagai publikasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini akan menjelaskan tentang proses awal fokus Muhammadiyah dalam resolusi konflik. Kemudian menjelaskan tentang cara pandang Muhammadiyah dan resolusi konflik Israel-Palestina. Setelah itu bantuan yang diberikan oleh Muhammadiyah, terakhir fokus pada analisis Barnes (2006) terhadap posisi Muhammadiyah.

### a. Internasionalisasi Muhammadiyah dan Agenda Resolusi Konflik

Pasca reformasi terjadi perubahan signifikan dengan tatanan *civil society* di Indonesia. Jika pada masa Soeharto, *civil society* internasional atau sebaliknya *civil society* yang ingin menginternasionalisasikan gerakannya mendapatkan hambatan dari pemerintah, maka pasca reformasi *civil society* mendapatkan ruang yang begitu besar untuk melakukan ekspansi (Wardana & Hidayat, 2019). Hal ini terjadi karena di zaman Soeharto, pemerintah ingin melokalisir kekuatan politik baik yang berasal dari partai politik maupun dari kekuatan masyarakat. Dalam konteks ini era Soeharto disebut dengan demokrasi otoriter, maka pasca reformasi ada agenda untuk mengimplementasikan demokrasi secara terbuka (Buyung Nasution, 2004).

Perubahan pasca reformasi ini memberikan ruang terhadap *civil society*, termasuk di dalamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912 diarahkan tidak hanya membawa misi perubahan di masyarakat Indonesia melainkan juga memberikan dampak secara global (Adi Nugroho, 2023). Agenda ini penting karena Muhammadiyah juga melihat bahwa banyak *civil society* bercorak agama mampu untuk melakukan transformasi secara global. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan ada juga Gullen Movement (Barton, 2014).

Secara internal, upaya internasionalisasi menjadi agenda penting di Muhammadiyah. Hilman Latief (2015) berargumentasi bahwa misi penting bukan hanya untuk meningkatkan basis Muhammadiyah di luar negeri, tapi juga menjadi bagian dari *international exposure*. Sedangkan bagi Najib burhani (2016) internasionalisasi Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai ruh bagi kemunculan Islam yang lebih berkeadilan. Walaupun juga diakui bahwa diskursus mengenai Islam moderat itu sulit untuk diinterpretasikan. Termasuk juga Din (2014) yang merupakan ketua umum Muhammadiyah 2005-2015 menyampaikan bahwa agenda ini penting bagi peran peradaban Muhammadiyah.

Sedangkan secara eksternal, misi internasionalisasi mendapatkan ruang dikarenakan oleh faktor globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kaldor (2012) internasionalisasi sejalan dengan kemampuan manusia untuk bertransformasi dalam komunikasi. Manusia dengan mudah melakukan kontak dengan manusia

lainnya tanpa harus mengunjungi secara langsung. Era yang awalnya *transborder* berubah menjadi *borderless*.

Hanya saja lokus Muhammadiyah dalam agenda internasional masih menjadi pertanyaan. Sebab internasionalisasi sendiri dapat bermakna menjadi internasionalisasi gerakan, internasionalisasi ide dan gagasan, serta internasionalisasi peran (Latief, 2015). Dengan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah mendorong agar organisasinya tersebar luas di seluruh dunia. Selain itu juga dapat bermakna internasional ide dan gagasan. Berarti ide dan gagasan Muhammadiyah sudah seharusnya disebarluaskan dapat berupa buku maupun dengan kehadiran Muhammadiyah dalam forum internasional yang lebih mengarah pada pemikiran. Sedangkan internasionalisasi peran dapat dilihat dari kontribusi Muhammadiyah dalam forum dan lembaga-lembaga internasional.

Dari sini Muhammadiyah menjadikan agenda resolusi konflik sebagai salah satu isu penting dalam upaya internasionalisasi (Arrobi, 2019). Muhammadiyah merasa sudah memiliki kemampuan secara nasional. Muhammadiyah sudah membutakan diri dengan menjadi salah satu mediator dalam berbagai kasus konflik yang terjadi di Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan 2003. Muhammadiyah ikut dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh, Sampit, Maluku maupun yang terjadi di Papua (Jurdi, 2010).

Dalam tataran intelektual, Muhammadiyah juga memiliki lembaga yang memiliki peran dalam upaya resolusi konflik. Muhammadiyah memiliki modal besar lewat CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations) (Muhammadiyah Board, 2012). Sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang dialog antar agama. Tujuan utama dari adanya CDCC adalah adanya kesamaan persepsi bahwa agama tidak semua sebagai sumber konflik, namun lebih dari itu agama dapat dijadikan sebagai solusi terhadap konflik. CDCC memegang peranan sentral dalam menunjukkan ke dunia luar bahwa Muhammadiyah memiliki misi yang kuat terhadap penyelesaian konflik.

Muhammadiyah juga turut hadir dalam berbagai agenda dialog-dialog peradaban. Dalam catatan Amirrachman (2015) era Din Syamsuddin merupakan puncak tertinggi Muhammadiyah dalam mendorong terciptanya perdamaian global. Walaupun harus diakui bahwa Syafi'i Ma'arif menjadi salah satu pioner penting dalam agenda-agenda kemanusiaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah (Akmaliah, 2020).

Di sisi yang lain Muhammadiyah menyadari bahwa secara eksternal negara-negara yang berada di ruang lingkup ASEAN memiliki konflik *intra-state* (Muna, 2013). Umumnya konflik tersebut berhubungan langsung dengan narasi agama. Pada kasus Filipina, mereka memiliki permasalahan dengan Moro Islamic Liberation Front. Permasalahan ini sudah terjadi sejak awal berdirinya negara Filipina yang pada saat tersebut berawal dari MIM (Muslim Independence Movement), terus bertransformasi jadi MNLF (Moro National Liberation Front), kemudian pecah menjadi MILF (Moro Islamic Liberation Front) (Kadir, 2020). Begitu juga dengan Thailand yang masih berjuang untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat Thailand Selatan (Qodir et al., 2020). Thailand bagian selatan sendiri dihuni oleh mayoritas umat Islam. Begitu juga dengan Myanmar yang masih berjuang untuk menyelesaikan permasalahan dengan etnis Rohingnya yang seringkali berujung dengan konflik (King & Owen, 2020).

Permasalahan negara-negara yang berada di wilayah ASEAN sendiri menjadi motivasi awal Muhammadiyah untuk dapat memberikan bantuan. Bantuan itu sendiri sudah terlihat dari kehadiran Muhammadiyah di Mindanao sejak tahun 2009 sampai dengan terwujudnya *Comprehensive Agreement on Bangsamoro* (Mahdi & Chusnul, 2022). Begitu juga dengan Thailand, dimana Din Syamsuddin terlibat aktif untuk berbicara dengan Raja Thailand tentang upaya membangun dialog secara langsung dengan tokoh-tokoh Muslim, khususnya di Pattani (Suara Muhammadiyah, 2020). Sedangkan Dalam kasus Myanmar, Muhammadiyah aktif untuk terlihat dalam pemberian bantuan serta mendorong berdirinya sekolah dan rumah sakit di wilayah konflik itu sendiri (Kuwado, 2017).

#### b. Posisi Muhammadiyah Dalam Konflik Israel-Palestina

Perang Israel-Palestina akan terkooptasi dalam berbagai dimensi isu yang berbeda. Sebagian menganggap itu adalah konflik agama (Airlangga PH et al., 2024). Sebagian lagi menganggap bahwa

ini merupakan konflik etnik dan ras (Owais, 2021). Sedangkan yang lain menganggap bahwa isu ini adalah isu *global politics* (Mason, 2020). Berbagai dimensi tersebut pada akhirnya akan berada pada dua tarikan utama yaitu konflik politik dan konflik agama. Dua tarikan ini memberikan justifikasi kuat bagi Muhammadiyah untuk menentukan sikap dengan tepat. Berdasarkan pada pandangan Abdul Mu'ti yang merupakan sekretaris pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan posisi Muhammadiyah sebagai berikut:

*"Kita harus memperjelas bahwa ini adalah konflik politik yang menyangkut perebutan wilayah antara Palestina dan Israel. Ini adalah situasi di mana masyarakat internasional melabeli tindakan Israel sebagai pendudukan atau agresi terhadap wilayah Palestina."*(Muhammadiyah, 2024a).

Uniknya, walaupun Muhammadiyah tidak menganggap bahwa itu merupakan perang agama. Hal ini didasarkan pada fakta tahun 2022 bahwa 17 persen dari penduduk Israel adalah muslim yang mencapai kurang lebih 1,5 juta jiwa. Sedangkan di pihak Palestina sendiri dapat dilihat bahwa tidak semua aktivis anti zionis adalah muslim, sebagian adalah Yahudi, Kristen bukan agama nenek moyang seperti Druze (Muhammadiyah, 2024a). Akan tetapi Muhammadiyah secara jelas menempatkan dirinya bahwa setiap negara dilarang untuk melakukan okupasi wilayah terhadap negara lainnya. Selama ini Israel menganggap bahwa Palestina bukanlah negara sehingga konsekuensi dari tindakannya tidak memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat.

Muhammadiyah sejak awal sudah mendukung upaya pendirian negara Palestina. Muhammadiyah menilai hanya kemerdekaan yang dapat menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan perdamaian. Sebab secara politik, Palestina akan berdaulat dan memiliki kekuatan dan dukungan secara internasional. Selama ini, khususnya negara-negara di Eropa belum bersedia mengakui keberadaan Palestina. Walaupun belakangan beberapa negara sudah menyatakan dukungannya. Dukungan Muhammadiyah agar Palestina menjadi negara berdaulat tidak kemudian mengeliminasi keberadaan Israel. Muhammadiyah mendukung terbentuknya dua negara berdaulat yang saling menghormati secara politik (Muhammadiyah, 2024b).

Sejak awal, Muhammadiyah sudah menentukan posisi yang jelas dengan menjadi pendukung utama dari kemerdekaan Palestina. Muhammadiyah merasa bahwa yang terjadi di Palestina merupakan bentuk okupasi paksa yang masih terjadi di zaman modern (Muhammadiyah, 2024b). Dengan Bahasa lain, Israel telah melakukan penjajahan secara nyata. Posisi Muhammadiyah yang mendukung kemerdekaan sebenarnya dapat dilihat dengan perspektif sejarah. Muhammadiyah menjadi organisasi yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal, terutama pasca proklamasi tahun 1945 (Azca, 2019).

Posisi Muhammadiyah yang mendukung Palestina sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berdaulat menyatakan dengan tegas bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

### c. Bantuan Muhammadiyah Untuk Konflik Israel-Palestina

Dalam catatan (Azca, 2019) peran Muhammadiyah dalam mendukung kemerdekaan Palestina sudah ada sejak tahun 1948. Upaya Muhammadiyah dilakukan dengan menyerukan kepada seluruh bangsa agar menjadikan isu perjuangan Palestina sebagai isu utama. Sedangkan dalam catatan Amal & Olifiani (2023) peran Muhammadiyah dalam mendukung Palestina dapat dikategorikan ke dalam empat poin utama. *Pertama*, memberikan bantuan kemanusiaan. Hal ini dilakukan dengan menggalang dukungan masyarakat Indonesia dan dunia internasional untuk memberikan dukungan secara langsung terhadap hak dasar warga Palestina. *Kedua*, menggalang dukungan lewat negara-negara dengan pemeluk Islam. Dukungan dapat dilakukan dengan memberikan ruang bagi Palestina untuk dapat menjadi anggota PBB. *Ketiga*, melakukan penghimpunan dana yang dilakukan secara langsung. Dana ini kemudian disalurkan ke lembaga internasional yang memiliki jangkauan secara langsung di Palestina. *Keempat*, melakukan advokasi dan kesadaran tentang arti penting perjuangan Palestina bagi masyarakat secara umum.

Peran Muhammadiyah secara nyata juga dapat dilihat dari pernyataan sikap Muhammadiyah dalam beberapa poin berikut. Pertama, Muhammadiyah secara jelas menyampaikan mendukung rakyat Palestina. Dukungan ini diberikan lewat donasi atau sumbangan. Biasanya dilakukan dengan meminta Lazismu membuka donasi dengan jalur yang spesifik yaitu bantuan kemanusiaan. Selain itu juga Muhammadiyah membantu lewat penyaluran relawan kemanusiaan (Muhammadiyah, 2024c). Relawan ini akan diterjunkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mendapatkan luka akibat dari senjata atau bahkan bantuan kepada anak kecil yang harus sekolah di rumah.

Kedua, Muhammadiyah mendorong agar PBB sebagai organisasi resmi dunia untuk mengambil langkah-langkah politik dan diplomasi untuk dapat segera menghentikan perang. Upaya penghentian perang ini dapat dilakukan lewat gencatan senjata terlebih dahulu baru dilakukan perundingan damai. Walaupun PBB selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina, akan tetapi di tingkat Dewan Keamanan seringkali upaya diplomatik ini gagal karena lima anggota Dewan Keamanan memiliki hak veto yang tidak dapat diganggu gugat (Muhammadiyah, 2024b).

Ketiga, secara internal Muhammadiyah yang masih berada di wilayah Indonesia mendorong pemerintah proaktif dalam memberikan dukungan. Muhammadiyah meminta agar pemerintah Indonesia memanfaatkan forum internasional sebagai wadah dalam mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan respon yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan lobi diplomasi di PBB sendiri, maupun di Organisasi Kerjasama Islam atau dapat dilakukan lewat Gerakan Non Blok (Muhammadiyah, 2024b).

Keempat, Muhammadiyah mendorong agar umat Islam tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pemberitaan media yang belum tentu memiliki semangat yang sama. Muhammadiyah meminta agar masyarakat bersikap rasional. Sebab bisa jadi konflik Israel-Palestina dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membuat terjadinya konflik di Indonesia. Konflik dalam skala global seringkali dapat memberikan dampak secara nasional. (Muhammadiyah, 2024b)

Peran Muhammadiyah secara langsung juga diperlihatkan oleh Lazismu. Lembaga yang berada dibawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah melakukan berbagai upaya dalam membangun masyarakat Palestina. Lazismu melakukan pemberdayaan lewat berbagai pelatihan dalam bidang pertanian, peternakan, menjahit, desain grafis, fotografi, perbaikan telepon pintar bahkan juga pelatihan dalam meningkatkan kapasitas warga Palestina (Muhammadiyah, 2024c). Muhammadiyah juga memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, perlengkapan Ramadhan, pembelian hewan kurban, perlengkapan kebersihan, obat-obatan, peralatan medis, ambulan, serta dana yang dapat digunakan untuk membangun kembali masjid di Gaza .

Selama ini Muhammadiyah juga aktif membantu warga Palestina untuk mendapatkan Pendidikan. Umumnya Muhammadiyah menawarkan kesempatan bagi warga Palestina yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat Universitas, Muhammadiyah menawarkan beasiswa penuh. Selain itu juga Muhammadiyah juga membantu warga Palestina yang sedang kuliah di luar negeri untuk mendapatkan pembiayaan kuliah.

d. Analisis Barnes

Dari berbagai peran tersebut dapat dilihat peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Civil Society Dalam Pandangan Barnes (2006)

No	Peran <i>Civil society</i>	Dampak
1	Melakukan kampanye penyelesaian konflik secara konstruktif.	Tinggi
2	mengubah pandangan terhadap konflik	Sedang
3	memberikan gambaran masa depan yang lebih baik	Sedang
4	melakukan mobilisasi terhadap konstitun untuk perdamaian	Tinggi

No	Peran <i>Civil society</i>	Dampak
5	menguatkan kekuasaan untuk mengurani kekerasan dan mempromsikan stabilitas	Sedang
6	menciptakan perdamaian dengan membantu terwujudkan perjanjian.	Rendah
7	melakukan perdamaian pragmatis, serta melakukan perdamaian di level komunitas	Sedang
8	melakukan transformasi tentang penyebab dan akibat konflik serta menciptakan houngan damai	Sedang

Sumber: modifikasi dari Barnes (2006)

Secara umum Muhammadiyah terlihat kuat dalam melakukan kampanye secara damai. Sejak awal, Muhammadiyah menginginkan agar konflik diselesaikan secara damai. Muhammadiyah menilai kedua negara sama-sama memiliki kekuatan sejarah yang kuat untuk memberikan justifikasi terhadap kedaulatan. Muhammadiyah selalu menyeru agar perang dihentikan baik di level internal Muhammadiyah, masyarakat Indonesia dan di berbagai forum dunia. Muhammadiyah menginginkan agar permasalahan dan konflik segera dapat diselesaikan secara konstruktif. Selain itu Muhammadiyah juga terlihat kuat dalam melakukan mobilisasi perdamaian secara langsung. Agenda-agenda yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak hanya secara makro, tetapi juga secara mikro. Muhammadiyah selalu mendekati kalangan muda untuk selalu mendorong terwujudnya perdamaian. Bahkan Muhammadiyah membekali mereka untuk memiliki skill dalam bernegosiasi di dalam forum.

Peran Muhammadiyah terlihat dalam posisi sedang terkait dengan upaya mengubah pandangan terhadap konflik. Muhammadiyah tidak dapat melakukan ini secara maksimal karena belum memiliki perwakilan resmi yang di Palestina. Muhammadiyah sudah ada di hampir 30 negara, namun Palestina yang merupakan wilayah konflik belum dapat dijadikan sebagai tempat untuk berdakwah secara langsung. Muhammadiyah memang mengundang para pemuda Palestina untuk dapat segera keluar dari persepsi buruk terkait konflik. Akan tetapi, terdapat konstruksi kuat dari Israel yang menguasai berbagai media dan sumber daya untuk menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merupakan sebuah hal yang legal. Muhammadiyah juga tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Peran ini seharusnya lebih banyak diambil oleh negara atau kekuatan lembaga internasional. Muhammadiyah juga berusaha untuk mempromosikan di level bawah tentang arti penting perdamaian lewat berbagai kegiatan. Selain itu juga berupaya untuk melakukan transformasi dengan memberikan bantuan beasiswa bagi mereka yang sedang melanjutkan perkuliahan. Sedangkan upaya untuk melakukan perdamaian lewat perjanjian juga belum dapat dilakukan oleh Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut.

#### 4. Simpulan

Peran Muhammadiyah dalam resolusi konflik sudah dimulai sejak dilakukannya upaya internasionalisasi pasca turunnya Soeharto. Muhammadiyah memiliki pengalaman dalam menangani konflik lokal yang ada di Indonesia. Muhammadiyah dalam melihat konflik Israel dan Palestina bukan semata-mata konflik agama, melainkan sebuah bentuk kolonialisasi terhadap wilayah Palestina. Muhammadiyah sepenuhnya mendukung agar Palestina dapat segera menjadi negara merdeka. Muhammadiyah juga memberikan berbagai bantuan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Secara langsung Muhammadiyah membantu dalam bentuk makanan, pelatihan dan turun ke lapangan. Sedangkan secara tidak langsung Muhammadiyah mendesak negara-negara Timur Tengah untuk serius dalam menyelesaikan konflik ini.

Berdasarkan pada pendekatan Barnes menunjukkan bahwa Muhammadiyah sudah berperan aktif. Peran tersebut jika dilihat dengan pendekatan *civil society* dalam resolusi konflik, Muhammadiyah sudah berupaya untuk menjalankannya. Hanya saja tidak semua peran tersebut

dianggap memberikan kontribusi secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kapasitas Muhammadiyah yang terbatas dalam konteks relasi politik internasional. Muhammadiyah tidak memiliki akses secara langsung dengan kedua belah pihak. Muhammadiyah menitikberatkan pada keberpihakan terhadap Palestina.

### Referensi

- Adi Nugroho, D. (2023). Upaya Internasionalisasi Muhammadiyah Melalui Sektor Pendidikan. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 85–98. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2020>
- Ahmed, A. A., & Lecturer, B. O. (2020). The Role of Civil Society in Peace Building in somalia. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(11), 1–9.
- Airlangga PH, A. R., Saputri, W. A., & Nurhakim, P. R. (2024). Socio-religious behavior on consumption pattern during Israel and Palestine conflict in Muslim society. *IAS Journal of Localities*, 1(2), 138–152. <https://doi.org/10.62033/iasjol.v1i2.22>
- Akmaliah, W. (2020). The demise of moderate Islam: New media, contestation, and reclaiming religious authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24>
- Al-Nashif, N. (2024). onference of Civil Society Organisations working on the Question of Palestine. United Nation. <https://www.un.org/unispal/conference-of-civil-society-organisations-working-on-the-question-of-palestine/>
- Amal, M. T., & Olifiani, L. P. (2023). Peran Ormas Muhammadiyah sebagai Faith-Based Organization dalam Memberikan Respons Kemanusiaan terhadap Rakyat Palestina. *J u r n a l I C M E S*, 2(7), 200–2020.
- Amirrachman, A. (2015). Dialog Antar-Agama dan Kerja Sama Strategis Antar-Peradaban: Sebuah Pencapaian Soft Diplomacy. In *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah Ke Depan*. Mizan.
- Azca, M. N. et. all. (2019). Dua Menyemai, Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Perdamaian dan Demokrasi. Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM.
- Barnes, C. (2006). Agents for Change: Civil Society Roles in Preventing War & Building Peace. *European Centre for Conflict Prevention*, September, 1–112.
- Barton, G. (2014). The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(3), 287–301. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124>
- Burhani, A. N. (2016). Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran Dari Puritanisme Ke Kosmopolitanisme. Mizan Pustaka.
- Burhani, A. N. (2018). Pluralism, liberalism and islamism: Religious outlook of Muhammadiyah. *Studia Islamika*, 25(3), 433–470. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.7765>
- Buyung Nasution, A. (2004). Sistem Semi Presidensial dalam Proyek. *Hukum*, 12(28), 1–11.
- Chaney, P. (2023). Civil Society Perspectives on Rights and Freedoms in the Association of Southeast Asian Nations. In *European Journal of East Asian Studies (Vol. 22, Issue 3)*. <https://doi.org/10.1163/15700615-02203005>

- Efendi, D., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2021). From fiqh to political advocacy: Muhammadiyah's ecological movement in the post new order indonesia. *Studia Islamika*, 28(2), 349–383. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>
- Elfversson, E., & Nilsson, D. (2022). The pursuit of inclusion: Conditions for civil society inclusion in peace processes in communal conflicts in Kenya. *Cooperation and Conflict*, 57(2), 171–190. <https://doi.org/10.1177/00108367211047136>
- Esra Çuhadar and Sari Hanafi. (2010). Israel and Palestine: Civil Societies in Despair. In T. Paffenholz (Ed.), *Civil Society and Peacebuilding: A Critical Assessment* (pp. 207–234). Lynne Rienner Publishers.
- Funnell, G. (2019). *Civil Society & Inclusive Peace. Key insights and lessons from a global consultation convened on Peace Insight* (Issue February).
- Hicken, A. (2009). The Philippines in 2008: Peace-building, war-fighting, and crisis management. *Asian Survey*, 49(1), 193–199. <https://doi.org/10.1525/as.2009.49.1.193>
- Huberman, K. (2021). Diplomatic Innovation and the Role and Responsibility of Civil Society. *The Jerusalem Strategic Tribune*. <https://jstribune.com/hubermam-middle-east-peace-civil-society/>
- Husein, R., Kurniawan, B. D., & Kurniawati, N. (2024). Humanitarian Diplomacy in Action: Examining Muhammadiyah as a Model for Faith-Based Organizational Engagement. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jhi.v13i1.19673>
- Jatmika, M. I., & Anggraheni, P. (2021). Civil Society's Role in Indonesia's Humanitarian Diplomacy: Study of Indonesian Religious Organizations' Humanitarian Aid in the Crisis in Myanmar's Rakhine State Region (2012- 2018). *Politea*, 4(2), 234. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.12792>
- Jurdi, S. (2010). *Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia, 1966-2006*. Pustaka Pelajar.
- Kadir, D. N. (2020). Perjanjian damai Filipina-Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan komitmen Presiden Benigno Aquino III. *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.2>
- Kaldor, M., Moore, H., & Selchow, S. (2012). *Global Civil Society*. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/9780230369436.pdf>
- King, A. S., & Owen, M. (2020). 'From Dialogue to Action': The Promise and Challenge of a Multireligious Approach to Peacebuilding. A Myanmar Case Study. *Religions*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/rel11030121>
- Kmec, V., & Ganiel, G. (2019). The Strengths and Limitations of the Inclusion of Religious Actors in Peace Processes in Northern Ireland and Bosnia and Herzegovina. *International Negotiation*, 24(1), 136–163. <https://doi.org/10.1163/15718069-24011143>
- Kuwado, F. J. (2017). Lazismu Buka Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Rohingya. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/06054851/lazismu-buka-bantuan-kemanusiaan-bagi-warga-rohingya-ini-nomor-rekeningnya>
- Kyselova, T. (2023). How to make civil society inclusion in inter-state peace mediation meaningful: Lessons from the Minsk Negotiation Process 2014-2021. <https://doi.org/10.61880/DAJQ2447>
- Latief, H. (2015). Ekspansi Spiritualisme Dan Gerakan Sosial Muhammadiyah: Dari Regionalisme ke Transnasionalisme. In A. & A. K. Amirrachman, Alpha. Nurbowo (Ed.), *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah Ke Depan*. Mizan.
- Latief, H. (2017). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Edisi Revi). Suara Muhammadiyah.

- Mahdi, I., & Chusnul, M. (2022). Civil society and peace: The role of Muhammadiyah in GPH-MILF Conflict. *Technium Social Sciences Journal*, 36, 756–767. <https://doi.org/10.47577/tssj.v36i1.7356>
- Mason, V. (2020). The liminality of Palestinian refugees: betwixt and between global politics and international law. *Journal of Sociology*, 56(1), 84–99. <https://doi.org/10.1177/1440783319882539>
- Mcnamee, T. (2021). *The State of Peacebuilding in Africa Lessons Learned for Policymakers and Practitioners*. Palgrave Macmillan.
- Moh Zaki Arrobi. (2019). Muhammadiyah Sebagai Nobel Peace Laureate, Mengapa Tidak? In H. L. Ridho Al-Hamdi, David Efendi, Bachtar Dwi Kurniawan (Ed.), *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan* (pp. 245–251). Gramasurya.
- Muhammadiyah Board. (2012). *Concolidating Multicultural Democracy*.
- Muhammadiyah, P. (2024a). Abdul Mu'ti: The Israeli-Palestinian Conflict Is Not a Religious War. Muhammadiyah.or.Id. <https://en.muhammadiyah.or.id/abdul-muti-the-israeli-palestinian-conflict-is-not-a-religious-war/>
- Muhammadiyah, P. (2024b). General Secretary of Muhammadiyah Calls for Ceasefire and Reconciliation in Gaza. Muhammadiyah.or.Id. <https://en.muhammadiyah.or.id/general-secretary-of-muhammadiyah-calls-for-ceasefire-and-reconciliation-in-gaza/>
- Muhammadiyah, P. (2024c). Muhammadiyah Extends Over IDR 27 Billion in Humanitarian Aid to Palestinians since 2018. Muhammadiyah.or.Id. <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-extends-over-idr-27-billion-in-humanitarian-aid-to-palestinians-since-2018/>
- Muna, R. (2013). *The Impact of Intra-State Conflict to Regional Stability and ASEAN Community. In Peace for Bangsamoro: Dukungan Muhammadiyah pada Perdamaian Bangsamoro*. Muhammadiyah University Press.
- Munayyer, Y. (2014). Civil society takes the lead on Palestinian rights. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2014/6/22/civil-society-takes-the-lead-on-palestinian-rights>
- Nilsson, D. (2021). Sequencing Inclusion of Civil Society Actors From Inclusion in Peace Negotiations to Participation in Implementing Peace Agreements? Uppsala University.
- Owais, M. (2021). Zionism and Identity Crisis: Ethnic Conflict between Israelis and Palestinians. *Global Political Review*, VI(I), 1–9. [https://doi.org/10.31703/gpr.2021\(VI-I\).14](https://doi.org/10.31703/gpr.2021(VI-I).14)
- Qodir, Z., Jubba, H., Hidayati, M., Abdullah, I., & Long, A. S. (2020). A progressive Islamic movement and its response to the issues of the ummah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 323–352. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.323-352>
- Rachmawati Husein. (2015). MDMC dan Penanggulangan Bencana: Kontribusi Kemanusiaan Global. In *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi Dan Agenda Muhammadiyah Ke Depan*. Mizan.
- Relations, C. on F. (2024). Israeli-Palestinian Conflict Timeline. [https://education.cfr.org/learn/timeline/israeli-palestinian-conflict-timeline?\\_gl=1%2Appayy%2A\\_gcl\\_au%2AMzg3NjE2NDM5LjE3MjQ5NzEyMTc.%2A\\_ga%2AMTc0NjM5OTE2NC4xNzE3MDQ2OTg4%2A\\_ga\\_24W5E70YKH%2AMTcyNzQwNDEwNy4zLjAuMTcyNzQwNDEwOS41OC4wLjA](https://education.cfr.org/learn/timeline/israeli-palestinian-conflict-timeline?_gl=1%2Appayy%2A_gcl_au%2AMzg3NjE2NDM5LjE3MjQ5NzEyMTc.%2A_ga%2AMTc0NjM5OTE2NC4xNzE3MDQ2OTg4%2A_ga_24W5E70YKH%2AMTcyNzQwNDEwNy4zLjAuMTcyNzQwNDEwOS41OC4wLjA).
- Robert E, S. (2000). Case Study. In Y. S. L. Norman K. Denzin (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.

- 
- Setrana, M. B. (2022). Promoting Peace and Managing Farmer-Herder Conflict: The Role of Civil Society Organizations in Agogo, Ghana. *African Studies Review*, 65(2), 430–454. <https://doi.org/10.1017/asr.2021.92>
- Suara Muhammadiyah. (2020). Din Syamsuddin: Muhammadiyah Ikut Mendamaikan Konflik Internasional. Muhammadiyah.or.Id. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/01/14/prof-dr-hm-din-syamsuddin-ma-muhammadiyah-ikut-mendamaikan-konflik-internasional/>
- Sugara, R. (2020). The Responses of Indonesian Muslims to Humanitarian Crisis in Syria, Yemen, and Myanmar. *Icri* 2018, 1737–1744. <https://doi.org/10.5220/0009934517371744>
- Suprpto, Lidiawati, Mahatva Yoga Adi Pradana, A. M. (2019). The Role and Thought of The Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah On Humanity. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 3(2), 127–145.
- Syaifullah. (2019). Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi. *Suara Muhammadiyah*.
- Syamsuddin, D. (2014). Muhammadiyah Untuk Semua. *Suara Muhammadiyah*.
- Wardana, A., & Hidayat, S. (2019). E multiplicity of Muhammadiyah's political engagement in Indonesia's DPD election. *Studia Islamika*, 26(1), 75–111. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.6422>